

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Keaslian Penelitian	20
E. Kegunaan Penelitian	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN	29
TEORI		
A. Tinjauan Pustaka	29
1. Kajian tentang Demokrasi	29
2. Kajian tentang Sistem Perwakilan	37
3. Kajian tentang Lembaga Perwakilan Rakyat	41
		xiii

4. Kajian tentang Dewan Perwakilan Rakyat	45
5. Kajian tentang Partai Politik	64
6. Kajian tentang Pengaturan Rekrutmen di	82
Beberapa Negara	
7. Pola Pikir	92
B. Landasan Teori	94
1. Teori Rekrutmen Politik	94
2. Teori Kedaulatan Rakyat	101
3. Teori Perwakilan	104
BAB III METODE PENELITIAN	109
A. Cara Penelitian	109
B. Sistematika Disertasi	124
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN	126
PEMBAHASAN	
A. Penyebab Permasalahan dalam Sistem	126
Rekrutmen Anggota Legislatif yang Saat Ini	
Dilaksanakan oleh Partai Politik	
1. Peraturan Perundang-Undangan Tidak	126
Mengakomodasikan Sistem Rekrutmen yang	
Ideal	
a. Inventarisir Peraturan Perundang-	127
Undangan sebagai Dasar Rekrutmen	
Anggota Legislatif yang Saat Ini	

Dilaksanakan oleh Partai Politik

b. Peraturan Perundang-Undangan yang	154
Menjadi Faktor Penyebab Lemahnya	
Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif	
1) Analisis Pengaturan dalam Undang-	155
Undang No. 2 Tahun 2008 tentang	
Partai Politik	
2) Analisis Pengaturan dalam Undang-	166
Undang No. 2 Tahun 2011 tentang	
Perubahan Atas Undang-Undang	
No. 2 Tahun 2008 tentang Partai	
Politik	
3) Analisis Pengaturan dalam Undang-	173
Undang No. 8 Tahun 2012 tentang	
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD	
c. Peraturan Perundang-Undangan yang	176
Menjadi Faktor Pendorong Lemahnya	
Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif.	
1) Analisis Pengaturan dalam Undang-	177
Undang No. 2 Tahun 2011 tentang	
Perubahan Atas Undang-Undang	
No. 2 Tahun 2008 tentang Partai	
Politik	

2) Analisis Pengaturan dalam Undang-	193
Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu	
3) Analisis Pengaturan dalam Undang-	202
Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD	
4) Analisis Pengaturan dalam	217
Peraturan KPU No. 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu	
2. Inkonsistensi Aturan Internal Partai Politik	222
Terhadap Fungsi Rekrutmen oleh Partai Politik	
a. Inventarisir Peraturan Internal Partai	223
Politik sebagai Dasar Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif yang Saat Ini Dilaksanakan oleh Partai Politik	
b. Inkonsistensi Peraturan Internal Partai	308
Politik Terhadap Fungsi Rekrutmen Partai Politik	
c. Implikasi Inkonsistensi Peraturan Internal	316
Partai Politik sebagai Dasar Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif yang Saat	

Ini Dilaksanakan oleh Partai Politik

3. Tantangan Rekrutmen Anggota Legislatif di Indonesia	356
B. Bangunan Hukum sebagai Kerangka Konseptual Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif Guna Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan	384
1. Korelasi Konstruksi Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif dengan Penguatan Sistem Perwakilan di Indonesia	385
2. Konstruksi Hukum Sebagai Kerangka Konseptual Sistem Rekrutmen yang Ideal	389
a. Paradigma Konstruksi Hukum	389
b. Pengaturan Partisipasi Masyarakat Untuk Dapat Memberi Masukan Terkait Bakal Calon Legislatif	425
c. Pengaturan Penguatan Kewenangan KPU Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Rekrutmen Anggota Legislatif	437
d. Pengaturan Penguatan Fungsi Pendidikan Politik dalam Penguatan Kelembagaan Partai Politik Untuk Mendukung Fungsi	440

Rekrutmen		
e. Pengaturan Penguatan Fungsi Kaderisasi		448
Politik dalam Penguatan Kelembagaan		
Partai Politik Untuk Mendukung Fungsi		
Rekrutmen		
BAB V PENUTUP		454
A. Kesimpulan		454
B. Saran		458
DAFTAR PUSTAKA		